

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA DALAM UPAYA MENGHADAPI TANTANGAN GLOBAL

Armai Arief

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
Email: armaiarief@gmail.com

Abstract: Building nation's characters is an interesting issue to discuss. The issue cannot be separated from other issues within the nation. In this case, education plays a significant role. Education has to be able to lead the nation to solve various problems, including the changing values and its implication. It is important to note how education can contribute to the process of revitalization of cultural values within the context of social changes. Indonesian education is very fortunate to have *Pancasila* as its basic principle. Actualization of the values of *Pancasila* can be seen as a promising alternative in developing nation's characters and culture. *Pancasila* is the core of national philosophy and ideology that has been formulated based on Indonesia's culture and religions. It is important to note that the spirit of *Pancasila* is manifest in the formulation of the objectives of the national education.

Keywords: education, culture, karakter nation, the values of Pancasila, globalization.

Abstraks: *Character building* bangsa merupakan persoalan yang menarik. Masalah tersebut tidak dapat dilepaskan dari persoalan kebangsaan dan begitu juga persoalan pendidikan berkaitan dengan kemampuan pendidikan dalam menuntaskan persoalan besar seputar perubahan nilai dengan segala implikasi sosial budaya yang mengiringinya. Bagaimana pengembangan pendidikan budaya sehingga menjadi kekuatan institusional bagi proses revitalisasi nilai budaya masyarakat dalam konteks perubahan nilai, baik yang sedang berlangsung maupun pada masa yang akan datang, merupakan pokok bahasan yang saat ini dirasakan sangat urgen mengingat berbagai persoalan yang mendera negeri ini secara beruntun. Salah satu alternatif dalam upaya pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa ini, dapat dilakukan melalui aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Karena kebajikan yang menjadi atribut suatu karakter pada dasarnya adalah nilai. Oleh karena itu, pendidikan budaya dan karakter bangsa pada dasarnya adalah pengembangan nilai-nilai yang berasal dari pandangan hidup atau ideologi bangsa Indonesia, agama, budaya, dan nilai-nilai Pancasila yang terumuskan dalam tujuan pendidikan nasional.

Kata kunci: pendidikan budaya, karakter bangsa, nilai-nilai Pancasila, globalisasi.

Pendahuluan

Globalisasi adalah sebuah kata yang sangat populer sejak era 80-an dan menjadi momok yang merepotkan banyak orang. Globalisasi adalah sebuah proses sejarah panjang yang meniscayakan terjadinya perdagangan bebas dan menjadi ajang kreasi dan perluasan bagi pertumbuhan perdagangan dunia, serta pembangunan dengan sistem pengetahuan berbasis teknologi. Ketika zaman televisi masih dimonopoli oleh TVRI, mungkin peran pendidik, seperti guru dan orang tua tidak terlalu berat dan melelahkan. Di samping jenis tayangan

yang memang masih terbatas, tetapi bentuk tayangan juga masih mempertimbangkan aspek budaya lokal masing-masing daerah di Indonesia. Tayangan Si Unyil, drama Losmen, serial Aku Cinta Indonesia (ACI) begitu digemari dan menjadi rujukan para guru dan orang tua.

Betapa tidak? Jika para orang tua dahulu tidak perlu terlalu khawatir dengan anak-anak mereka akan terpengaruh dengan budaya Barat yang tidak sesuai bahkan bertentangan dengan budaya Timur, zaman sekarang justru sebaliknya, para orang tua tidak bisa tidak resah. Akibatnya adalah komunikasi global yang menembus bukan saja batas-batas negara tetapi telah memasuki

sampai ke ranah pribadi, yaitu lingkungan keluarga di rumah. Bisa dikatakan hampir setiap rumah di kalangan keluarga di Indonesia, baik kota maupun pedesaan telah memiliki TV atau barang-barang elektronik. Tidak itu saja, jaringan komputer dan internet bisa dipastikan dapat diakses oleh semua kalangan mulai orang tua, remaja bahkan anak-anak melalui *handphone* yang mudah dibawa ke mana saja. Yang menjadi permasalahan adalah kecanggihan teknologi sebagai bagian dan kebudayaan globalisasi tidak diperuntukkan sebagaimana fungsinya, justru dihiasi dengan gambar-gambar seronok, adegan kekerasan, mistik dan lain sebagainya dan bahkan hanya dijadikan sebagai ajang mode *Life Style* para penggunanya yang tadinya dibeli untuk memperoleh akses informasi dan memperlancar penulisan tugas-tugas sekolah maupun komunikasi si anak. Inilah globalisasi informasi yang seolah tak terbendung mengantar pada globalisasi budaya yang tengah merasuki masyarakat Indonesia.

Permasalahan internal dalam negeri pun masih belum menemukan titik terang hendak dibawa ke mana bangsa ini. Semangat reformasi yang diidam-idamkan seluruh masyarakat Indonesia dan diharapkan dapat menyembuhkan degradasi moral bangsa serta mampu menciptakan kemakmuran negeri ini, ternyata tidak berarti apa-apa. Bahkan, bisa dikatakan hampir tidak ada perbedaan antara pemerintahan pascareformasi dengan pemerintahan Orde Baru sebelumnya. Sebutlah misalnya, politik uang (*money politics*), angka korupsi yang masih tinggi, dan berbagai tindakan anarkis yang mengatasnamakan golongan, kelompok dan agama tertentu yang berpotensi besar mengancam keutuhan NKRI.¹ Disamping itu adanya arus materialisme dan hedonisme mengancam redupnya nasionalisme masyarakat Indonesia, berkurangnya rasa persaudaraan,

semakin tajamnya individualisme. Akibatnya, karakter bangsa Indonesia hampir di semua level, mulai dan para orang tua yang seharusnya menjadi panutan sampai di kalangan pemuda, remaja dan anak-anak mengalami disorientasi. Sampai saat ini Indonesia masih terancam disintegrasi sosial dan politik, baik secara vertikal maupun horizontal. Benih-benih disintegrasi, konflik, dan kekerasan sosial masih terus bersemai karena berbagai faktor politik, sosial, budaya, dan agama. Membiarkan bangsa ini terkoyak-koyak oleh persoalan SARA sama saja maknanya dengan pengkhianatan terhadap cita-cita luhur sebagai bangsa yang beradab.

Pendidikan Budaya dan Tantangan Global

Era globalisasi ditandai dengan persaingan ekonomi secara hebat berbarengan dengan terjadinya revolusi teknologi informasi, komunikasi dan industri. Hal ini berarti terjadinya perubahan sosial yang mengubah pola komunikasi, teknologi, produksi dan konsumsi serta peningkatan paham internasionalisme sebagai sebuah nilai budaya. Kini bangsa Indonesia telah memasuki globalisasi yang baru, yaitu globalisasi ekonomi. Bagi negara-negara maju dunia terlalu sempit bila disekat tarif antar negara, apalagi yang bersifat proteksionis. Dengan mulai berlakunya pasar bebas, maka lalu lintas barang, jasa, modal dan tenaga kerja sedunia pun menjadi bebas. Kemudian adanya tuntutan teknologi produksi yang makin lama makin tinggi tingkatannya, sehingga makin tinggi pula tingkat pendidikan yang dituntut dan para pekerjanya.

Kondisi kemajuan teknologi informasi dan industri di atas yang berlangsung dengan amat cepat dan ketat di era globalisasi menuntut setiap negara untuk berbenah diri dalam menghadapi persaingan tersebut. Bangsa yang mampu membenahi dirinya dengan meningkatkan sumber daya manusianya, kemungkinan besar akan mampu bersaing dalam kompetisi tersebut.

¹ Komaruddin Hidayat, Pengantar dalam A. Ubaedillah dan Abdul Rozak (penyunting), *Pendidikan Kewargaan*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006), Cet. 2, h. 6.

Tentu saja terjadinya era globalisasi memberi dampak ganda, baik yang menguntungkan maupun merugikan. Dampak yang menguntungkan adalah memberi kesempatan seluas-luasnya terjadinya transformasi informasi dan teknologi. Di sisi lain, jika kita tidak mampu bersaing dengan produk luar karena Sumber Daya Manusia (SDM) yang lemah, maka konsekuensinya akan merugikan bangsa kita dan persaingan ekonomi dan teknologi, termasuk mereduksi nilai-nilai budaya bangsa. Kebudayaan sebuah bangsa tidak pernah statis, terkadang senantiasa dinamis dan beradaptasi secara dialektis dan kreatif dengan dinamika masyarakat. Adakalanya ia mempengaruhi, juga sebaliknya, dipengaruhi masyarakatnya. Kebudayaan mengalir dalam gerak saling-pengaruh yang tanpa akhir dalam denyut nadi kehidupan. Terkadang arusnya kecil, terkadang besar, bahkan ia bisa menjadi gelombang besar yang mempengaruhi kesadaran dan perilaku kita. Kalau kini orang berbicara tentang krisis masyarakat yang mendalam, bukankah ia juga berbicara tentang krisis budaya, krisis nilai, krisis kehidupan itu sendiri.

Selama ini, budaya atau kebudayaan terlalu sering dibicarakan dalam tema-tema besar yang serba abstrak. Seperti dalam pidato-pidato kebudayaan yang menuntut refleksi yang dalam dan kecerdasan nalar-logika yang rumit. Persoalan budaya dan karakter bangsa kini menjadi sorotan tajam masyarakat. Sorotan itu mengenai berbagai aspek kehidupan, tertuang dalam berbagai tulisan di media cetak, wawancara, dialog, dan gelar wicara di media elektronik. Selain di media massa, para pemuka masyarakat, para ahli, dan para pengamat pendidikan, dan pengamat sosial berbicara mengenai persoalan budaya dan karakter bangsa di berbagai forum seminar, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Persoalan yang muncul di masyarakat seperti korupsi, kekerasan, kejahatan seksual, perusakan, perkelahian massa, kehidupan ekonomi yang konsumtif, kehidupan politik yang tidak

produktif, dan sebagainya menjadi topik pembahasan hangat di media massa, seminar, dan di berbagai kesempatan. Berbagai alternatif penyelesaian diajukan seperti peraturan, undang-undang, peningkatan upaya pelaksanaan dan penerapan hukum yang lebih kuat.

Tentu saja ruang-ruang perenungan budaya seperti ini penting. Akan tetapi, sesungguhnya untuk saat ini yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana kita memandang budaya dengan sederhana. Budaya kita lihat saja dalam kecenderungan sikap, laku, tindak, dan tutur kata kita sehari-hari yang amat kasat mata. Katakanlah, mengikuti istilah pemikir budaya mutakhir, sebagai budaya kehidupan sehari-hari (*culture of everyday life*). Sayang, berbagai pemikiran kritis yang lahir dan perenungan yang dalam dan tulus tentang budaya dan masyarakat Indonesia itu dilontarkan, lantas disambut dan diperdebatkan dengan hangat, kemudian dilupakan begitu saja, seakan lenyap ditelan arus sejarah.

Alternatif lain yang banyak dikemukakan untuk mengatasi, paling tidak mengurangi, masalah budaya bangsa yang dibicarakan itu adalah pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai alternatif yang bersifat preventif karena pendidikan membangun generasi baru bangsa yang lebih baik. Sebagai alternatif yang bersifat preventif, pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kualitas generasi muda bangsa dalam berbagai aspek yang dapat memperkecil dan mengurangi penyebab berbagai masalah budaya bangsa. Memang diakui bahwa hasil pendidikan akan terlihat dampaknya dalam waktu yang tidak segera, tetapi memiliki daya tahan dan dampak yang kuat di masyarakat.

Salah satu tantangan pendidikan kita saat ini selain ketidakmampuan sumber daya manusia adalah ketidakberdayaan birokrasi dan masyarakat dalam menghadapi pesatnya arus informasi melalui berbagai media seperti televisi dan internet yang menawarkan gaya hidup (*Life Style*) dan budaya populer. Keduanya menyediakan peluang sekaligus tantangan bagi

masa depan dunia pendidikan kita, baik berupa pengaruh terhadap proses belajar mengajar di kelas maupun pola asuh orang tua di rumah. Seperti diketahui pendidikan merupakan sebuah cara paling kuat untuk mengubah struktur budaya masyarakat. Dan pendidikan massal melalui media massa seperti TV, internet, surat kabar dan majalah merupakan bentuk lain dan transplantasi budaya, di mana proses infiltrasi budaya satu ke budaya lainnya berlangsung secara intensif dan dapat menyebabkan terjadinya penghapusan budaya (*Cultural Genocide*) secara perlahan-lahan.

Dampak dari tayangan televisi yang banyak menampilkan kekerasan, mistisisme, hura-hura ala sinetron dapat menyebabkan anak-anak muda usia sekolah mengalami apa yang disebut "*toxic culture*" yang mengarah pada depresi dan sakit jiwa, kriminalitas di usia muda meningkat, egoisme tambah menjadi-jadi, bahkan juga dapat merusak lingkungan dan budaya sekolah yang tidak sehat. Sebagai bangsa yang menghargai nilai-nilai kebersamaan dan kegotong-royongan dalam masyarakat, bentuk tayangan yang tersaji di depan kita saat ini sangat mengganggu perkembangan kepribadian anak. Selain televisi, patut juga diperhatikan regulasi tayangan dalam bentuk permainan (*games*) yang merambah hingga ke telepon seluler. Jenis pendidikan massal seperti ini pasti akan meningkatkan "egoisme" siswa secara negatif dan menjurus ke individualisme yang akan berakibat serius pada keterpecahan keluarga dan struktur sosial, sehingga pada akhirnya akan meruntuhkan akar-akar budaya lokal yang solid dan alami.

Di sisi lain, pada aspek pendidikan bangsa ini muncul berbagai krisis pendidikan yang dewasa ini mencuat ke permukaan, antara lain:

- a) Pendidikan formal/sekolah mengalami berbagai masalah antara lain: kurikulum *overload*, fasilitas yang tidak memadai, belum meratanya kesejahteraan guru, kualitas dan kuantitas pendidik yang terbatas, anggaran tidak memadai dan lain sebagainya. Menghadapi beragam masalah

tersebut, sekolah seakan kehilangan relevansinya dengan pembentukan karakter. Sekolah sebagai konsekuensinya, lebih merupakan sekedar tempat bagi *transfer of knowledge* daripada *character building*, tempat pengajaran daripada tempat pendidikan.

- b) Pendidikan informal/keluarga mengalami berbagai masalah antara lain menyangkut ekonomi keluarga, harmonisasi keluarga, dan lain sebagainya.
- c) Pendidikan nonformal/masyarakat juga mengalami masalah berkaitan dengan kepercayaan, keteladanan, dan lain sebagainya.

Bangsa ini tidak ingin seperti yang pernah dilontarkan budayawan Mochtar Lubis pada era tahun 70-an yang sudah berbicara sangat keras tentang wajah tidak keruan manusia Indonesia. Dengan wajah muram manusia Indonesia yang ciri-ciri pribadinya berkeping-keping: munafik, feodal, percaya tahayul, berwatak lemah, dan cenderung boros.² Mochtar Lubis khawatir bangsa kita akan tertinggal jauh, dan lebih celaka lagi akan jadi korban dalam percaturan dunia. Tak heran kalau Koentjaraningrat mengingatkan tentang perlunya perubahan mentalitas masyarakat Indonesia agar bisa menjadi bangsa yang maju. Dan uraian ini penting untuk segera mengambil langkah yang tepat dan strategis dalam membangun kembali pengenalan jati diri bangsa melalui ilmu pengetahuan dan nilai-nilai budaya sebagai bagian integral dan pendidikan budaya. Tentu saja, pencapaian tujuan tersebut harus melibatkan semua pihak, baik rumah tangga dan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Ketiga komponen tersebut diatas harus segera dirajut kembali. Dengan demikian persoalan karakter bangsa tidak dapat ditanggapi secara parsial, melainkan harus dilihat dan disikapi secara komprehensif, sehingga menimbulkan kesamaan pemahaman dan

²Mochtar Lubis, *Manusia Indonesia (Sebuah Pertanggungjawaban)*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988), h. 7.

langkah untuk membangun kembali karakter bangsa.

Revitalisasi Pendidikan dalam Pengembangan Nilai Budaya

Untuk memahami pengertian pendidikan budaya secara utuh akan diawali dengan pengertian budaya atau kebudayaan dalam kehidupan sosial atau makhluk budaya. Definisi klasik yang disusun oleh Tylor menyebutkan bahwa kebudayaan adalah kompleks keseluruhan dari pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan semua kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat atau dalam pengertian sederhana, kebudayaan adalah segala sesuatu yang dipelajari dan dialami bersama secara sosial oleh para anggota suatu masyarakat.³ Selanjutnya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan: (a) kebudayaan sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia, antara lain kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat; (b) kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan dan pengalamannya serta yang menjadi pedoman tingkah lakunya (suatu pendekatan antropologi).

Kebudayaan sebagai kata majemuk dan “budi” yang berarti potensi kemanusiaan berupa fitrah dan hati nurani dan “daya” sebagai kekuatan dan perekayasa merupakan aktualisasi dan potensi manusia dalam wilayah pikir, rasa, dan kemauan. Dengan kata lain, dari segi prosesnya, kebudayaan adalah pendayagunaan segenap potensi kemanusiaan agar berbudi dan manusiawi. Sedangkan dari segi hasil, kebudayaan adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh rekayasa manusia terhadap potensi fitrah dan potensi alam dalam rangka

meningkatkan kualitas kemanusiaannya.⁴ Dari uraian tersebut maka kebudayaan bersifat universal, kebudayaan bersifat lokal dan bukan universal. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki kebudayaan yang berbeda-beda terdapat dalam seluruh kehidupan sosial, meskipun perwujudannya menunjukkan ciri-ciri khusus sesuai dengan situasi, waktu, dan tempat masing-masing.

Untuk dapat mentransformasikan nilai-nilai dari budaya bangsa kepada seluruh komponen bangsa ini tentu saja hanya dapat dilakukan melalui jalur pendidikan, baik formal maupun non formal. Hubungan antara kehidupan budaya dan pendidikan dengan perubahan sosial, khususnya mengenai pergeseran nilai-nilai yang berkaitan dengan penguatan *character building* bangsa bagaimanapun merupakan persoalan yang menarik. Masalah tersebut tidak dapat dilepaskan dari persoalan kebangsaan dan begitu juga persoalan pendidikan berkaitan dengan kemampuan pendidikan dalam menuntaskan persoalan besar seputar perubahan nilai dengan segala implikasi sosial budaya yang rnengiringinya. Bagaimana pengembangan pendidikan budaya sehingga menjadi kekuatan institusional bagi proses revitalisasi nilai budaya masyarakat dalam konteks perubahan nilai, baik yang sedang berlangsung maupun pada masa yang akan datang, merupakan pokok bahasan yang saat ini dirasakan sangat urgen mengingat berbagai persoalan yang mendera negeri ini secara beruntun.

Pertanyaan tersebut diatas dapat dijelaskan dengan pertama kali melakukan kaji ulang secara makro terhadap konsepsi pendidikan itu sendiri dalam kerangka filosofis yang digunakan. Pentingnya tinjauan mengenai kerangka filosofis pendidikan karena kedudukannya sebagai kerangka acuan dalam meletakkan pendidikan dalam hubungannya menjawab persoalan yang telah dikemukakan. Dalam tataran konseptual

³Tylor, E.B.. *Primitive Culture: Researches Into The Development Of Mythology, Philosophy, Religion, Art, And Custom*, (New York: Gordon Press, 1974), p. 108.

⁴ Tabroni & Syamsul Arifin, *Islam Pluralisme Budaya & Politik*, (Yogyakarta: Sippres, 1994), h. 18

filosofis, pendidikan memang dipahami dalam perspektif berbeda. Perbedaan demikian akan berakibat pada perbedaan dalam memberikan titik tekan pada proses pendidikan, yaitu pada muatan materi yang diberikan. Di samping itu, perbedaan juga akan berimplikasi pada kepentingan pembaharuan pendidikan sesuai dengan perkembangan yang terjadi di luar konteks pendidikan.

Berdasarkan pertimbangan filosofis bahwa salah satu fungsi pendidikan adalah sebagai lembaga konservasi dan resistensi nilai. Tetapi semata-mata bertahan pada perspektif tersebut akan menghambat pendidikan budaya itu sendiri dalam proses kontinuitas pendidikan dengan perubahan sosial. Karena itu, dalam diskusi filosofis pendidikan yang lain sebagaimana telah menjadi pemikiran umum (*common sense*), pendidikan dipahami dalam konteks dialektika budaya. Dengan demikian, pendidikan diharapkan mempunyai peran secara dialektis-transformatif dalam konteks sosio-budaya yang senantiasa menunjukkan perubahan secara kontinu, sejalan dengan adanya sofistikasi budaya dan peradaban umat manusia.

Secara umum perubahan dipahami sebagai terjadinya perubahan di semua sektor kehidupan masyarakat. Perubahan dapat terjadi di bidang norma-norma, nilai-nilai, pola-pola perilaku, organisasi, susunan dan stratifikasi kemasyarakatan dan juga lembagakemasyarakatan.⁵ Dalam konteks ini, pendidikan perlu ditempatkan sebagai *open system* (sistem terbuka), bukan sebaliknya sebagai *close system* (sistem tertutup) yang membuka dirinya dan siap melakukan dialog kultural dengan perkembangan. Pendidikan dalam konteks masa depan, yaitu kontinuitas dengan perubahan di mana dibutuhkan suatu pandangan yang dapat menjelaskan dan mendudukan pendidikan secara sintetik-paradigmatis bahwa disamping dibutuhkan

muatan nilai yang solid juga dibutuhkan keterbukaan secara kreatif dan inovatif dalam pendidikan. Disinilah pendidikan budaya mendapatkan peranannya sebagai antisipasi kebutuhan masa depan

Pertama, pendidikan pada dasarnya sebagai suatu instrumen strategis pengembangan potensi dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, diantaranya adalah potensi moral. Potensi moral inilah yang menjadikan manusia secara esensial dan eksistensial sebagai makhluk religius (*homo religious*). Keadaan potensial tersebut, bukanlah sesuatu yang bersifat telah jadi (*state of being*), tapi merupakan keadaan natural (*state of nature*) yang perlu diproses (*state of becoming*) dalam konteks budaya secara makro maupun secara mikro melalui pendidikan. Dengan menyadari dimensi antropologis ini, maka pendidikan dengan sendirinya perlu mempunyai kerangka nilai dasar (*fundamental values*) yang tidak hanya komplementatif tapi filosofis.

Kedua, meminjam istilah Peter L. Berger, realitas sosiologis manusia yang selalu terlibat dengan proses dialektika fundamental dalam konteks sosiologis masyarakat.⁶ Dalam proses semacam itu, manusia secara dialektikal sebagai subyek yang terlibat secara aktif dan kreatif dengan proses kebudayaan (kenyataan dunia empirik-obyektif). Efek yang didapat tidak menutup kemungkinan mendapatkan pengaruh yang baik secara negatif maupun positif. Tidak mungkin dapat berdialektika dalam alur semacam ini tanpa ditopang kemampuan dan kekuatan pada diri manusia itu sendiri. Ada dua kemampuan dan kekuatan diperlukan:

- 1) Kemampuan dan kekuatan secara etik dan moral yang digunakan sebagai *value judgement* dalam menentukan bentuk realitas yang akan dijadikan ajang keterlibatan dirinya.
- 2) Kemampuan dan kekuatan secara intelektual.

⁵ lihat Selo Soemarjan, *Setangkai Bunga Sosiologi*, (Jakarta: Lembaga Penerbitan FE UI, 1974), h. 67.

⁶Peter L. Berger (ten), *The Sacred Cenopy*, (Jakarta: LP3ES, 1991), h. 112.

Jika yang pertama lebih bersifat defensif, maka yang kedua lebih bersifat ofensif, di mana manusia dapat melakukan konstruksi budaya melalui pendidikan yang ia pahami sejak semula. Dua peran tersebut tidak dapat dilepaskan dan peran pendidikan budaya dalam membentuk karakter bangsa yang akan memberikan pengayaan dan penguatan (*empowering*) secara etik dan moral serta intelektual.

Pendidikan Karakter

Menurut Sigmund Freud dalam Soemarno, *character is striving system with underly behaviour*⁷(karakter merupakan kumpulan tata nilai yang terwujud dalam suatu sistem daya dorong yang melandasi pemikiran, sikap dan perilaku yang bisa ditampilkan secara mantap). Karakter juga merupakan internalisasi nilai-nilai yang semula berasal dari lingkungan dan menjadi bagian dari kepribadiannya. Selanjutnya, karakter merupakan nilai-nilai yang terpatri dalam diri kita melalui pendidikan, pengalaman, percobaan, pengorbanan dan pengaruh lingkungan, menjadi nilai intrinsik yang melandasi sikap dan perilaku kita. Jadi, karena karakter melandasi sikap dan perilaku manusia, tentu karakter tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus dibentuk, dibangun, dan ditumbuhkembangkan.

Dalam Islam, menjunjung tinggi karakter mulia menjadi keharusan yang tidak bisa ditawar. Hal ini dipertegas dengan pernyataan Nabi Muhammad Saw. yang menghubungkan akhlak dengan kualitas kemauan, bobot amal, dan jaminan masuk surga sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah Ibn Amr: “*Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik akhlaknya ...*” (HR. al-Tirmidzi). Dan dalam hadis yang lain: “*Sesungguhnya orang yang paling cinta kepadaku di antara kamu sekalian dan paling dekat tempat duduknya denganku di hari kiamat adalah yang terbaik akhlaknya di antara*

kamu sekalian ...” (HR. al-Tirmidzi). Dalil tersebut menunjukkan bahwa karakter dalam perspektif Islam bukan sekedar hasil pemikiran yang terlepas dari realitas hidup, melainkan merupakan persoalan yang terkait dengan akal, ruh, hati, jiwa, realitas, dan tujuan yang digariskan oleh Akhlaq Qur’aniah.⁸ Dengan demikian, karakter mulia merupakan sistem perilaku yang diwajibkan dalam agama Islam melalui nash al-Quran dan hadis.

Ada tiga pilar utama yang sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter seseorang, yaitu pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah/lembaga pendidikan, dan masyarakat. Pembentukan karakter tidak akan berhasil selama ketiga pilar ini tidak ada kesinambungan dan harmonisasi.

Pertama, keluarga. Dalam setiap masyarakat, upaya untuk melanggengkan nilai dan norma yang berlaku pada para anggotanya dilakukan melalui proses sosialisasi. Tanggung jawab pewarisan nilai serta norma tersebut diberikan kepada orang tua sebagai wakil generasi sebelumnya kepada anak-anaknya yang akan melanjutkan generasinya dan berlangsung dalam kehidupan keluarga. Keluarga sebagai lingkungan pertama pembentukan watak dari pendidikan mestilah diberdayakan kembali. Keluarga merupakan lapangan pendidikan yang pertama, dan pendidiknya adalah kedua orang tua. Orang tua adalah pendidik kodrati. Oleh karena itu, keluarga merupakan basis dari bangsa, karena sangat menentukan keadaan bangsa itu sendiri. Bangsa yang besar dan maju hanya dapat terbentuk melalui keluarga yang dibangun atas dasar *mawaddah wa rahmah*. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Gilbert Highest seorang psikolog yang juga seorang pendidik menyatakan

⁷Soemarno Soedarsono, *Membangun Kembali Jati Diri Bangsa*, (Jakarta: Elex Media Computindo, 2006), h. 15.

⁸ Ali Khalil Abu Ainain, *Falsafah al-Tarbiyah fi al-Qurân al-Karim*. (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabiyy, 1985), h. 186.

bahwa kebiasaan anak-anak sebagian besar terbentuk oleh pendidikan keluarga.⁹

Kedua, sekolah/lembaga pendidikan. Sejalan dengan fungsi dan peranannya, maka sekolah sebagai kelembagaan pendidikan adalah pelanjut dari pendidikan keluarga. Sekolah pada hakikatnya bukan sekedar tempat *transfer knowledge*, tetapi juga dapat dipahami sebagai proses penanaman nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya; proses pengembangan potensi seseorang untuk mencapai *enabling* (pemertabatan, pemuliaan) manusia. Pembentukan karakter di lingkungan sekolah dapat dilakukan melalui langkah-langkah sosialisasi dan membiasakan penerapan nilai-nilai akhlak dan moral dalam perilaku sehari-hari, menjelaskan kepada anak didik tentang berbagai nilai-nilai yang baik dan yang buruk serta akibatnya bila melakukannya, dan menerapkan pendidikan berbasis karakter (*character based education*) kepada setiap mata pelajaran yang ada selain mata pelajaran tertentu seperti pelajaran agama dan Pancasila.

Ketiga, masyarakat. Lingkungan masyarakat jelas lebih luas dan memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan penanaman nilai-nilai estetika dan etika. Dalam arti yang lebih luas dapat dinyatakan bahwa pembentukan karakter seseorang tergantung dari pembentukan nilai-nilai, moral dan spiritual jika seseorang berada dalam lingkungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut. Dalam kaitan ini pula, terlihat besarnya pengaruh masyarakat terhadap pertumbuhan karakter seseorang sebagai bagian aspek kepribadian yang terintegrasi dalam pertumbuhan psikis. Dengan demikian, fungsi dan peran masyarakat dalam pembentukan karakter akan sangat tergantung dari seberapa jauh masyarakat tersebut menjunjung norma nilai-nilai, moral dan spiritual itu sendiri.

Pancasila sebagai Penguatan Budaya dan Karakter Bangsa

Dalam bidang sosial budaya, bangsa Indonesia telah memperlihatkan beberapa kemajuan dalam beberapa tahun belakangan ini, diantaranya adanya kenaikan anggaran dibidang pendidikan, penegakan hukum, dan kesadaran untuk hidup rukun dalam kemajemukan. Meskipun demikian, masih ada permasalahan sosial yang perlu mendapatkan pemecahan serius, diantaranya:¹⁰

- a) Memudarnya rasa dan ikatan kebangsaan. Indikasinya dapat dilihat dan semakin menguatnya rasa primordialisme, apatisme dan individualisme. Primordialisme dalam berbagai bentuknya (etnis/kedaerahan, kelompok, dan keagamaan) berkembang sebagai dampak dari kebebasan politik yang berlebihan dan faktor ekonomi. Sementara apatisme dan individualisme yang melunturkan nasionalisme terjadi akibat globalisasi yang mendorong penetrasi budaya asing tidak terkelola dengan baik.
- b) Disorientasi nilai keagamaan. Kehidupan beragama masih dihadapkan pada paradoks antara maraknya semangat keagamaan dengan kecenderungan sikap hidup permisif, materialistik dan sekuler yang berlawanan dengan nilai-nilai luhur agama. Di samping itu, keberagaman belum sepenuhnya berfungsi mewujudkan kerukunan dan kebersamaan.
- c) Memudarnya kohesi dan integrasi sosial. Berbagai bentuk kekerasan dengan motif yang sangat kompleks masih terus terjadi dalam kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia yang dikenal santun, berubah menjadi bangsa yang beringas dan mudah melakukan kekerasan. Berbagai perilaku menyimpang dan kriminalitas seperti pembunuhan, tawuran, penyalahgunaan

⁹ Lihat Gilbert Highest (ten), *Seni Mendidik*, (Jakarta: Bina Ilmu, 1962), h. 56.

¹⁰ *Revitalisasi Visi dan Karakter Bangsa, Agenda Indonesia Ke Depan*, (Yogyakarta: Diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009), h. 110

narkotika, pornografi dan lain sebagainya cenderung meningkat. Justru sebaliknya, sikap gotong-royong dan saling menghormati perbedaan semakin memudar.

- d) Melemahnya mentalitas positif. Dalam kehidupan masyarakat terdapat kecenderungan pelemahan mentalitas yang tercermin dan sikap suka menerabas, perilaku instant, tidak disiplin, tidak menghargai mutu, kurang bertanggung jawab dan lain sebagainya.

Solusi yang dapat dilakukan untuk dapat keluar dari berbagai krisis tersebut adalah dengan kembali kepada nilai-nilai falsafah Pancasila. Sebagai bangsa yang menganut falsafah hidup Pancasila, maka Pancasila, nilai-nilai agama, dan kearifan budaya lokal merupakan karakter bangsa. Sebagaimana diketahui bahwa Pancasila merupakan hasil rumusan nilai-nilai luhur bangsa, yaitu:¹¹

Pancasila merupakan ideologi pemersatu bangsa yang digali dari akar budaya bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi hingga sekarang, baik nilai-nilai agama, adat istiadat, kebersamaan, kesetaraan, keadilan, maupun perjuangan untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan.

Nilai-nilai luhur ini mengkristal dalam rumusan Pancasila sebagai perwujudan filsafat kemanusiaan yang mencerminkan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Rumusan Pancasila ini merupakan suatu pandangan hidup yang telah diyakini bangsa Indonesia sebagai suatu kebenaran oleh karena itu dijadikan falsafah hidup bangsa.

Ada beberapa nilai yang dapat diaktualisasikan dari nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sila pertama, menuntut masing-masing warga negara Indonesia untuk mengakui Tuhan

Yang Maha Esa sebagai pencipta dan tujuan akhir baik dalam hati maupun dalam perilaku sehari-hari. Konsekuensinya adalah Pancasila menuntut masing-masing umat beragama dan berkepercayaan untuk hidup rukun dan saling menghormati meski berbeda keyakinan. Ini merupakan nilai ketuhanan dan kemasyarakatan yang harus dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Sila kedua mengajak masyarakat untuk mengakui dan memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia, yang memiliki martabat mulia, dan hak-hak serta kewajiban asasi. Dengan kata lain sikap untuk menjunjung tinggi martabat dan hak-hak asasinya atau bertindak adil dan beradab terhadapnya. Ini merupakan nilai kemanusiaan dan nilai kesetaraan yang menunjukkan tidak adanya perlakuan diskriminatif walaupun dari suku, agama, ras, dan golongan yang berbeda. Dalam hal ini manusia harus dilihat dari sisi kemanusiaannya bukan dari simbol-simbol yang dimilikinya.

Sila ketiga, menumbuhkan sikap masyarakat untuk mencintai tanah air, bangsa, dan negara Indonesia, ikut memperjuangkan kepentingan-kepentingan nasional dan loyal terhadap sesama warga negara. Sila ini mengandung nilai persatuan, nilai perjuangan, dan semangat nasionalisme (keindonesiaan) bukan semangat kedaerahan seperti yang banyak terjadi akhir-akhir ini.

Sila keempat mengajak masyarakat untuk bersikap peka dan ikut serta dalam kehidupan politik serta pemerintahan negara, setidaknya secara tidak langsung, bersama dengan sesama warga atas dasar persamaan tanggung jawab sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Sila ini mengandung nilai-nilai kemasyarakatan, permusyawaratan, dan saling menghormati di antara sesama untuk mengabdikan kepada bangsa dan negara berdasarkan kedudukannya dan profesinya masing-masing.

Sila kelima mengajak masyarakat untuk aktif dalam memberikan sumbangan yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kedudukannya masing-

¹¹Armai Arief, "Aktualisasi Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa sebagai Salah Satu Perwujudan Peningkatan Integrasi Bangsa", dalam *Makalah* disampaikan pada workshop Badan Kesatuan Bangsa DKI Jakarta, Oktober 2012.

masing kepada negara demi terwujudnya kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir dan batin yang dapat dirasakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Sila ini mengandung nilai keadilan dan kebersamaan yang mencerminkan keluhuran budaya bangsa.¹²

Oleh karena itu, bangsa yang memiliki karakter yang kuat akan menjadi bangsa maju. Ciri-ciri bangsa yang maju adalah masyarakatnya berpikiran progres, berdaya dan berkembang, berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional dan mampu menghadapi tantangan global. Secara umum bangsa yang maju bercirikan:

- 1) Memiliki wawasan dan kreativitas yang tinggi;
- 2) Memiliki kualitas sumber daya dan kemampuan hubungan internasional;
- 3) Menguasai ilmu pengetahuan & teknologi serta dilandasi iman dan taqwa;
- 4) Memiliki pendidikan yang cukup dan handal;
- 5) Memiliki watak kewirausahaan dan independensi; dan
- 6) Mampu mengembangkan lembaga-lembaga kewirausahaan dalam rangka berjuang mempertahankan hidup (*struggle for life*).

Ada beberapa upaya pendekatan yang dapat dilakukan dalam pembangunan masyarakat adalah: (1) Pembinaan; (2) Pengawasan; (3). Pengaturan

Disamping itu, langkah strategis dalam pembangunan masyarakat dapat dilakukan melalui:

- a) Pemberdayaan yaitu upaya yang dilakukan secara sistematis guna membangkitkan potensi masyarakat agar berkemampuan untuk berperan serta dalam pembangunan.
- b) Pengembangan yaitu upaya sistematis yang dilakukan untuk menumbuhkembangkan potensi kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan masyarakat.

- c) Perlindungan yaitu upaya sistematis yang dilakukan dalam rangka menjaga, menolong masyarakat dan pengaruh destruktif dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial.
- d) Budaya. pertahanan dan keamanan sebagai akibat dari perubahan lingkungan strategis domestik dan global serta menempatkan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Penutup

Dari pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa persoalan pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa dewasa ini harus menjadi perhatian semua kalangan termasuk para pemimpin bangsa, aparat penegak hukum, pendidik, dan tokoh-tokoh agama, etnis, golongan, dan lain sebagainya.

Dengan perhatian bersama, akan terwujud sebuah langkah bersama untuk secara terus-menerus membangun nilai-nilai luhur budaya sendiri dalam menumbuh-kembangkan karakter bangsa. Dengan demikian, masalah dan usaha pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa melalui aktualisasi nilai-nilai Pancasila di era global ini, menjadi tanggungjawab bersama semua komponen masyarakat dari berbagai lapisan.

Pendidikan budaya dan karakter bangsa dapat dilakukan melalui pendidikan nilai-nilai yang menjadi nilai dasar budaya bangsa. Kebajikan yang menjadi atribut suatu karakter pada dasarnya adalah nilai suatu bangsa. Oleh karena itu, pendidikan budaya dan karakter bangsa pada dasarnya adalah pengembangan nilai-nilai yang berasal dari pandangan hidup atau ideologi bangsa Indonesia, agama, budaya, dan nilai-nilai yang terumuskan dalam tujuan pendidikan nasional.

Pertama, agama. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena itu, kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaannya. Kehidupan kenegaraan pun

¹²Armai Arief, "Aktualisasi Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa sebagai Salah Satu Perwujudan Peningkatan Integrasi Bangsa".

didasari pada nilai-nilai yang berasal dari agama. Atas dasar pertimbangan itu, maka nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari agama.

Kedua, Pancasila. Negara kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni. Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga negara.

Ketiga, budaya. Tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakatnya sebagai suatu kebenaran. Nilai-nilai budaya itu dijadikan dasar dalam pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antaranggota masyarakat itu. Posisi budaya yang demikian penting dalam kehidupan masyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber nilai dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa.

Keempat, tujuan pendidikan nasional. Sebagai rumusan kualitas yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia, dikembangkan oleh berbagai satuan pendidikan di berbagai jenjang dan jalur. Tujuan pendidikan nasional memuat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki warga negara Indonesia. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional adalah sumber yang paling operasional dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa.

Daftar Pustaka

- Abu Ainain, Ali Khalil, *Falsafah al-Tarbiyah fi al-Quran al-Karim*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabiy, 1985.
- Arief, Armai, "Aktualisasi Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa sebagai Salah Satu Perwujudan Peningkatan Integrasi Bangsa", dalam *Makalah* disampaikan pada workshop Badan Kesatuan Bangsa DKI Jakarta, Oktober 2012.
- Berger, Peter L., *The Sacred Cenopy*, Jakarta: LP3ES, 1991.
- Hidayat, Komaruddin, *Pengantar dalam A. Ubaedillah dan Abdul Rozak (penyunting), Pendidikan Kewargaan*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Cet. 2, 2006.
- Highest, Gilbert, *Seni Mendidik*, Jakarta: Bina Ilmu, 1962.
- Lubis, Mochtar, *Manusia Indonesia (Sebuah Pertanggungjawaban)*, Jakarta: CV. Haji Masagung, Cet. Ke 8, 1988.
- Soedarsono, Soemarno, *Membangun Kembali Jati Diri Bangsa*, Jakarta: Elex Media Computindo, 2006.
- Soemarjan, Selo, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Jakarta: Lembaga Penerbitan FE UI, 1974.
- Tabroni & Arifin, Syamsul, *Islam Pluralisme Budaya & Politik*, Yogyakarta: Sypress, 1994.
- Tylor, E.B., *Primitive Culture: Researches Into The Development Of Mythology, Philosophy, Religion, Art, And Custom*, New York: Gordon Press, 1974.

